



LAPORAN SURVEY  
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2017



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2018**

**BAB V**  
**PENUTUP**

**5.1 Kesimpulan**

- a. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka dilakukan untuk melihat kinerja urusan pemerintah berdasarkan persepsi masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek kebijakan.
- b. Hasil survey indeks kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Bangka terkait penilaian masyarakat sudah pada nilai **67,37** atau kategori **B (Baik)**. Untuk urusan pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 67,67, urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 75,65, urusan Pendidikan 74,51, urusan Kesehatan 70,90, urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 68,75, urusan Sosial 68,95, urusan Tenaga Kerja 63,33, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 68,97, urusan Pangan 64,98, urusan Pertanahan 67,51, urusan Komunikasi dan Informatika 67,51, urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil 74,11, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa 69,10, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana 73,99, urusan perhubungan 66,60, urusan koperasi dan UKM 63,42, urusan penanaman modal 67,51, urusan kepemudaan dan olahraga 66,78, urusan statistik 66,21, urusan lingkungan hidup 61,75, urusan kebudayaan 68,62, urusan perpustakaan dan kearsipan 67,75, urusan perikanan 62,11, urusan pariwisata 62,58, urusan pertanian 64,57, urusan perdagangan 63,08, urusan perindustrian 62,47 dan urusan reformasi birokrasi 68,95.

- c. Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bangka dapat juga dilihat berdasarkan wilayah administratif (kecamatan). Indeks kepuasan masyarakat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka berada pada kategori B (Baik). Adapun nilai IKM per kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.1  
Nilai IKM Urusan Pemerintah per Kecamatan

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA PER URUSAN TAHUN 2017										
NO	URUSAN	NILAI IKM KAB. BANGKA	IKM Sungailiat	IKM Pemali	IKM Merawang	IKM Mendo Barat	IKM Puding Besar	IKM Bakam	IKM Riau Siliip	IKM Belinyu
1	PU DAN PENATAAN RUANG	67,67	67,78	65,31	66,93	65,79	67,28	63,60	66,61	63,64
2	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	75,65	73,16	75,44	76,16	76,59	83,64	80,61	80,71	71,10
3	PENDIDIKAN	74,51	74,20	75,49	74,33	75,25	75,88	73,70	77,14	72,10
4	KESEHATAN	70,90	71,36	71,36	71,51	69,91	71,07	69,37	73,67	69,31
5	KETENTRAMAN, TIBUM DAN LINMAS	68,75	69,15	65,40	72,43	69,88	68,69	66,23	70,14	66,49
6	SOSIAL	68,95	69,17	68,62	69,28	69,84	69,14	70,51	71,96	65,16
7	TENAGA KERJA	63,33	64,34	64,34	64,38	63,69	63,23	63,94	64,57	61,35
8	PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	68,97	68,22	64,56	73,15	69,21	70,10	70,10	72,43	67,43
9	PANGAN	65,57	67,05	62,42	66,44	65,56	65,45	63,64	66,57	64,41
10	PERTANAHAN	64,98	68,54	62,74	67,12	65,40	65,25	63,03	65,43	62,53
11	KOMINFO	67,51	69,81	66,58	68,61	68,02	65,28	64,12	67,29	66,22
12	ADM KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	74,11	73,98	75,17	74,66	74,94	74,95	72,93	77,29	70,86
13	PEMBERDAYAAN MASY DAN DESA	69,10	69,08	66,64	71,23	68,77	70,51	72,73	73,29	65,27
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	73,99	73,29	70,60	70,60	75,24	76,87	77,47	79,43	70,04
15	PERHUBUNGAN	66,60	69,94	65,60	66,78	64,23	65,40	63,59	66,54	64,20
16	KOPERASI UKM	63,42	68,43	63,74	63,97	59,84	62,42	60,42	60,86	63,02
17	PENANAMAN MODAL	67,51	68,43	65,30	68,70	68,02	63,34	64,09	67,29	65,46
18	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	66,78	67,48	64,83	68,95	66,80	66,20	66,67	68,33	65,09
19	STATISTIK	66,21	69,63	66,85	69,14	67,46	67,28	68,45	70,38	66,48
20	LINGKUNGAN HIDUP	61,75	67,47	63,58	63,14	55,08	55,08	61,21	58,14	60,71
21	KEBUDAYAAN	68,62	69,15	66,58	72,03	66,20	65,20	64,20	70,14	66,49
22	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	67,75	68,73	64,30	66,23	68,02	64,18	65,47	67,29	65,52
23	PERIKANAN	62,11	67,57	59,28	63,06	58,89	56,84	53,20	62,24	63,76
24	PARIWISATA	62,58	68,64	65,50	61,71	57,50	57,27	60,51	60,57	60,53
25	PERTANIAN	64,57	66,62	61,40	65,64	63,60	62,91	62,75	65,03	64,11
26	PERDAGANGAN	63,08	66,32	62,12	63,70	60,87	61,62	62,83	61,29	61,71
27	PERINDUSTRIAN	62,47	68,89	61,23	61,64	59,13	60,61	60,20	62,57	62,82
28	REFORMASI BIROKRASI	68,95	69,32	69,32	72,43	69,88	68,69	70,45	70,14	66,49
<b>TOTAL</b>		<b>67,37</b>	<b>69,13</b>	<b>66,23</b>	<b>68,33</b>	<b>66,24</b>	<b>66,59</b>	<b>66,29</b>	<b>68,48</b>	<b>65,44</b>

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan beberapa permasalahan diatas, maka perlu disampaikan beberapa hal sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kinerja urusan Pemerintahan yang ada di Kabupaten Bangka , antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan transparansi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka organisasi perangkat daerah (OPD)

pelayanan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keberadaan OPD beserta seluruh tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah tersebut.

- b. Mengingat pentingnya peningkatan mutu pelayanan dan kinerja secara terus-menerus dan berkesinambungan, maka survey Indeks Kepuasan Masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan dan periodik di tahun-tahun mendatang. Sehingga berdasarkan hasil survey IKM tersebut, OPD dapat melakukan perbaikan mutu pelayanan dan kinerja sesuai hasil penilaian dari masyarakat.